

**LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA**



**PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH
DI SMA UNGGULAN KOTA YOGYAKARTA**

Oleh:

Tina Rahmawati, M.Pd.

Slamet Lestari, S.Pd.

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 018/SP2H/PP/DP2M/III/2008, tanggal 6 Maret 2008

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DESEMBER. 2008**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. Judul Penelitian : Pemberdayaan Komite Sekolah di Sekolah Unggulan Kota Yogyakarta
2. Bidang ilmu penelitian : Pengembangan Kelembagaan
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Tina Rahmawati, M. Pd
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 132304797
 - d. Pangkat/Golongan : Penata muda/ III/a
 - e. Jabatan : Asisten Ahli
 - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Pendidikan/Administrasi Pendidikan
4. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
5. Lokasi Penelitian : SMA N 1 YK, SMA N 3 YK dan SMA N 8 YK
6. Waktu Penelitian : 6 bulan
7. Biaya : Rp 10.000.000,00

Yogyakarta, 21 Desember 2008

Mengetahui,
Dekan FIP

Ketua Peneliti

Dr. Achmad Dardiri
NIP. 130936811

Tina Rahmawati, M. Pd
NIP. 132304797

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Prof. Sukardi, Ph.D.
NIP. 130693813

RINGKASAN

PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH DI SMA UNGGULAN KOTA YOGYAKARTA

Oleh:

Tina Rahmawati

Slamet Lestari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan tempat penelitian di SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 8 Yogyakarta. Sumber data penelitiannya yaitu kepala sekolah, dan pengurus komite sekolah. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan program kerja komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta telah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran komite sekolah dan peran serta aktif komite sekolah dalam penyelenggaraan program kerja sekolah. Faktor pendukung pelaksanaan program komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta meliputi: adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu sekolah; dukungan dana, ide, tenaga dan fasilitas yang memadai; terjalannya komunikasi yang baik; koordinasi yang baik; latar belakang pendidikan anggota komite sekolah; dan kepala sekolah yang selalu proaktif. Faktor penghambat pelaksanaan program komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta adalah faktor kesibukkan pengurus komite sekolah dan jadwal/waktu pertemuan yang terbatas. (2) Pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta dilakukan dengan berbagai upaya komunikasi intensif dan terbuka antara pihak sekolah dengan komite sekolah, dan pelibatan komite sekolah dalam penyelenggaraan program kerja sekolah yang bersifat strategis. Secara umum kinerja komite sekolah berdampak positif terhadap terhadap mutu pendidikan di SMA Unggulan Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan materiil maupun nonmateriil dalam berbagai program peningkatan mutu sekolah.

PRAKATA

Puji syukur Tim Peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan laporan “Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap isu-isu kebijakan dan menghasilkan masukan yang terkait dengan komite sekolah dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pertimbangan pentingnya peran dan fungsi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. SMA Unggulan di Kota Yogyakarta, yang notabene sebagai salah satu kota barometer pendidikan di Indonesia, tentunya harus dapat dikelola sebaik-baiknya sehingga dapat menjamin kontinuitas kegiatan belajar dan mengajar yang ideal. Pemberdayaan komite sekolah dalam konteks tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekolah melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama yang baik antar anggota tim penelitian dan pihak-pihak lain yang berhubungan. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik materiil maupun moril, kami haturkan terima kasih. Kami sangat menyadari bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu setiap kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 18 Desember 2008

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan	6
B. Komite Sekolah	8
1. Pengertian Komite Sekolah	8
2. Tujuan Komite Sekolah	8
3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah	8
4. Organisasi Komite Sekolah	10
5. Pembentukan Komite Sekolah	12
6. Tata Hubungan Antar Komite Sekolah	13
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	14
B. Manfaat Penelitian	14
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	15
B. Subjek Penelitian dan Sumber Data	15
C. Objek Penelitian	16
D. Pendekatan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Teknik Analisis Data	17
G. Instrumen Penelitian	18
1. Instrumen Penelitian	18
2. Kisi-kisi Instrumen	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah di SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 YK	20
B. Upaya Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 YK	27

C. Pembahasan	33
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	42

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian	42
Personalia Tenaga Peneliti	46
Ijin Penelitian	50
Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian	51
Daftar Hadir Seminar Proposal Penelitian	53
Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian	55
Daftar Hadir Seminar Hasil Penelitian	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Paradigma sosiologis menganggap bahwa sekolah sebagai sistem sosial, karena sekolah ada karena ada masyarakat. Baik buruknya sekolah tergantung dari masyarakat bahkan sekolah menjadi cermin masyarakat. Jika masyarakatnya sakit maka lembaga sekolahnya juga sakit.

Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan melalui dewan sekolah dan komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada

empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Pengefektifan komite sekolah juga merupakan bagian dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. MBS merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan MBS dapat diidentifikasi: (1) adanya peningkatan otonomi atau kemandirian sekolah dalam mengelola sekolahnya; (2) adanya perubahan dalam sistem pengambilan keputusan ke arah pengambilan keputusan secara partisipatif, yang melibatkan semua komponen sekolah; (3) adanya peningkatan peran serta orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (4) adanya upaya dalam perbaikan praktik pembelajaran, menuju pembelajaran yang efektif dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian, keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi MBS dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.

Selama ini di Indonesia telah diupayakan pelibatan masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan, namun keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan dana untuk penyelenggaraan pendidikan atau sekedar untuk membantu serta menyediakan fasilitas belajar anak di rumah. Sementara itu, keterlibatan orangtua siswa dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, evaluasi dan akuntabilitas program belum dapat terealisasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang diidealkan oleh konsep MBS nampaknya merupakan upaya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan direalisasikan secara bertahap.

Masih rendahnya kesadaran orangtua dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat pendidikan orangtua, faktor budaya dan sikap orangtua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, diduga akan menjadi kendala utama dalam upaya pelibatan orangtua dalam pendidikan anaknya di sekolah. Sikap sebagian administrator sekolah dan guru, dan sikap iklim kerja yang tertutup juga menyebabkan rendahnya keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Erat kaitannya dengan implementasi MBS juga menyangkut peranan kepala sekolah, kewenangan yang diberikan kepada sekolah mengakibatkan kepala sekolah memiliki peranan yang krusial dan kuat dalam kebijakan pendidikan di sekolah. Dengan adanya komite sekolah pengelolaan pendidikan di sekolah diharapkan bisa transparan, efektif, dan efisien. Selain itu efek akuntabilitas dan

rentang pengawasan semakin pendek, pihak masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, realita di sekolah peranan komite sekolah tersebut belum seperti yang diharapkan. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai pemberdayaan program kerja komite sekolah sehingga dapat diketahui efektifitas kinerja komite sekolah maupun faktor-faktor pendukung dan penghambat proses kerja komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang tugas dan peran komite sekolah.
2. Kurangnya sosialisasi tugas dan peran komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta
3. Kurangnya efektifitas pelaksanaan program kerja komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta.
4. SDM komite sekolah yang belum berdaya guna secara maksimal.
5. Kurangnya peran komite sekolah terhadap pengembangan mutu pendidikan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program kerja, upaya pemberdayaan, dan dampak kinerja komite sekolah di SMA Unggulan Kota

Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program kerja komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta?

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan MBS adalah adanya peningkatan partisipasi orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut dapat terealisasi apabila antara sekolah dengan masyarakat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan dialog untuk merumuskan tujuan sekolah; (2) menciptakan hubungan yang baik antar partisipan; (3) harus mampu belajar dari pengalaman; (4) menjalin hubungan dengan lingkungan di luar sekolah; (5) menerapkan pendekatan belajar tuntas bagi siswa; dan (6) melibatkan semua partisipan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sediono dkk (2003), jenis peran serta masyarakat, termasuk orangtua/wali murid, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diklasifikasikan dari peran serta pada tingkatan yang terendah sampai tingkatan tertinggi, yaitu dari hanya sekedar menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh sekolah sampai keikut-sertaannya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Lebih rinci, jenis peran serta masyarakat, termasuk orangtua/wali murid, dapat diklasifikasikan:

1. Peran serta pada tingkatan terendah adalah hanya menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh sekolah, misalnya: masyarakat mau menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut.

2. Peran serta orangtua/wali murid dan masyarakat dengan cara memberikan kontribusi baik dana, bahan maupun tenaga, misalnya: membantu pembangunan gedung sekolah atau pengadaan fasilitas pendidikan yang lain, dengan dana, barang ataupun tenaga mereka.
3. Peran serta dalam bentuk menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak sekolah, atau sekolah bersama-sama dengan komite sekolah, misalnya: orangtua/wali murid menerima apa yang telah diputuskan oleh komite sekolah bersama-sama dengan sekolah mengenai besarnya iuran yang harus mereka bayar.
4. Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu, misalnya: kepala sekolah membahas mengenai masalah perbaikan pembelajaran bersama dengan komite sekolah dan orangtua siswa.
5. Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, misalnya: komite sekolah dan orangtua/wali murid mewakili sekolah bersama dengan Puskesmas setempat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah kesehatan dan gizi anak.
6. Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan oleh sekolah, misalnya: sekolah meminta bantuan kepada komite sekolah dan orangtua/wali murid tertentu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum mengenai masalah-masalah pendidikan.
7. Peran serta dalam pengambilan keputusan, misalnya: orangtua/wali murid ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan mengenai rencana kegiatan atau program-program sekolah serta konsekuensi pendanaannya.

B. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah “badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah” (SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah).

2. Tujuan Komite Sekolah

Komite sekolah memiliki tujuan untuk:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah).

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Komite Sekolah memiliki peran sebagai:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
- d. Penghubung (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan (SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah).

Dalam SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan Komite Sekolah berfungsi:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan;

- 4) kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4. Organisasi Komite Sekolah

- a. Keanggotaan Komite Sekolah
 - 1) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a) Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - (1) orang tua/wali peserta didik;
 - (2) tokoh masyarakat;
 - (3) tokoh pendidikan;
 - (4) dunia usaha/industri;
 - (5) organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - (6) wakil alumni;
 - (7) wakil peserta didik.

- b) Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).
- c) Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.

b. Kepengurusan Komite Sekolah:

- 1) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara;
- 2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
- 3) Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.
- 4) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- 5) Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART;
- 6) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Nama dan tempat kedudukan;
 - b) Dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c) Keanggotaan dan kepengurusan;
 - d) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e) Keuangan;
 - f) Mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
 - g) Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi.

5. Pembentukan Komite Sekolah

a. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) transparan, akuntabel, dan demokratis; dan
- 2) merupakan mitra satuan pendidikan.

b. Mekanisme Pembentukan

1) Pembentukan Panitia Persiapan

- a) Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik.

- b) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut Keputusan ini;
- (2) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- (3) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- (4) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;

- (5) Menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - (6) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
 - (7) Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan:
- c) Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.
- c. Penetapan pembentukan Komite Sekolah
- Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

6. Tata Hubungan Antar Organisasi Komite Sekolah

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif (SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui antara lain:

1. Efektivitas pelaksanaan program kerja komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta.
2. Upaya pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan pada pihak pengelola sekolah dan pengurus komite sekolah dalam pengambilan kebijakan dalam upaya mengembangkan dan memantapkan peranan komite sekolah.
2. Memberikan masukan pada pihak pengelola sekolah dan pengurus komite sekolah dalam peningkatan efektifitas kerja komite sekolah sehingga dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan mutu dan kemandirian sekolah.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di SMA Unggulan Kota Yogyakarta yakni SMA Negeri Favorit Kota Yogyakarta meliputi SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 YK. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan (Juni-November 2008).

B. Subyek Penelitian dan Sumber Data

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang akan dipermasalahkan (Suharsimi Arikunto, 1998:116). Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi subyek penelitian adalah Komite Sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta.

Untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sumber data yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Sekolah (atau guru) SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 Yogyakarta.
2. Ketua Komite Sekolah (atau yang mewakili) di SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 Yogyakarta.

Sumber data yang lain adalah dokumentasi, yang berupa arsip-arsip yang berkenaan dengan komite sekolah, misalnya Surat Keputusan pendirian Komite Sekolah, program kerja komite, dan laporan kerja sama komite dengan sekolah. Meskipun dalam wawancara sudah didapatkan data semacam ini akan namun tetap diperlukan untuk memperkuat data diperlukan *cross check* melalui dokumen-dokumen.

C. Obyek Penelitian

Suharsimi Arikunto (1996:97) menyebutkan bahwa obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah upaya pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, dimulai dari perumusan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan (Muhammad Ali, 1985:81). Tatang M. Amirin (1990:120) mengemukakan berbagai jenis pendekatan penelitian:

1. Studi atau penelitian eksploratif;
2. Penelitian perbandingan (komparatif);
3. Penelitian *grounded*;
4. Penelitian kausal komparatif;
5. Studi kasus;
6. Studi (penelitian aksi)/*action research*;
7. Studi deskriptif; dan
8. Studi leterer.

Ditinjau berdasarkan pendapat diatas, maka penelitian ini termasuk jenis studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan (menggambarkan) tentang sesuatu (obyek penelitian) apa adanya.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (1990:134) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara.

G. Kisi-kisi Instrumen

Adapun kisi-kisi instrumen penelitiannya seperti tertulis pada tabel di bawah ini.

Variabel	Sub-variabel
1. Efektivitas pelaksanaan program komite	a) Pemahaman kepala sekolah mengenai tugas dan peran komite b) Sosialisasi tugas dan peran komite c) SDM komite yang mendukung d) Keterlaksanaan program kerja komite e) Frekuensi pertemuan antara sekolah dengan komite f) Komunikasi yang efektif g) Koordinasi pelaksanaan program kerja h) Monitoring antara sekolah dengan komite i) Dukungan dana, moril j) Faktor penghambat dan pendukung
2. Upaya pemberdayaan komite sekolah	a) Forum dialog b) Keterbukaan c) Kontribusi dana, tenaga maupun fasilitas d) Konsultasi penetapan kebijakan e) Pengambilan keputusan secara mufakat dengan komite f) Keterlibatan dalam pemberian layanan g) Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan h) Peran serta pengambilan keputusan

Variabel	Sub-variabel
3. Dampak kinerja komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a) Layanan terhadap siswa b) Hubungan yang harmonis c) Menjalin hubungan/kemitraan di luar sekolah d) Keterlibatan menyeluruh partisipan dalam pengambilan keputusan e) Dukungan input (dana dan fasilitas) f) Proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah g) Evaluasi dan akuntabilitas program

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah

a. Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah di SMA 1

Yogyakarta

Pemahaman beberapa anggota mengenai tugas dan peran komite sekolah di SMA 1 Yogyakarta sudah sesuai dengan SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah di SMA N 1 Yogyakarta berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung. Dalam dimensi operasional, komite sekolah di SMA N 1 Yogyakarta berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, serta berperan sebagai pendukung sekolah, baik yang berwujud dukungan finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, komite sekolah di SMA N 1 Yogyakarta berperan sebagai pengontrol dan mediator antara pemerintah dan masyarakat. Hal inilah peran dan tugas komite sekolah yang dipandang masih belum maksimal dilaksanakan di SMA N 1 Yogyakarta.

Sosialisasi yang dilakukan mengenai tugas dan peran komite sekolah di SMA N 1 Yogyakarta dilakukan secara tertulis dan lisan. Sosialisasi secara tertulis dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui surat, website, dan pengumuman sekolah, sedangkan sosialisasi secara lisan dilakukan melalui forum

rapat sekolah.

Pengurus komite sekolah SMA N 1 Yogyakarta terdiri dari 15 orang dengan jangka waktu kepengurusan selama tiga tahun. Adapun susunan pengurus untuk periode tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut.

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Komisi-komisi
 - a. Organisasi dan Manajemen
 - b. Kurikulum dan Pembelajaran
 - c. Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - d. Usaha dan Penggalian Sumber Dana
 - e. Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
4. Staf Sekretariat
 - a. Sekretaris
 - b. Bendahara
 - c. Staf

Pengurus komite sekolah SMA N 1 Yogyakarta terdiri dari unsur tokoh masyarakat, wali/orang tua siswa, pengusaha, tokoh pendidikan, dan guru di sekolah tersebut.

Program komite sekolah yang selama ini berjalan di SMA N 1 Yogyakarta mampu mendukung program kerja sekolah baik akademik maupun non-akademik sebagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Komite sekolah di SMA N 1 Yogyakarta melakukan

pertemuan rutin tahunan setiap awal tahun pelajaran baru untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan membuat program kerja tahun berikutnya, serta setiap pergantian semester untuk monitoring dan evaluasi program kerja yang sedang berjalan. Selain daripada itu, pertemuan juga dilakukan jika ada berbagai permasalahan yang perlu segera diselesaikan (pertemuan insidental).

Komunikasi yang efektif antara sekolah dengan komite sekolah menjadi hal yang penting di SMA N 1 Yogyakarta. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan dan komitmen antara kepala sekolah dan pengurus komite sekolah. Cara sekolah menciptakan komunikasi yang efektif dengan komite selama ini dilakukan antara lain dengan upaya untuk terus menerus melibatkan komite sekolah dalam berbagai kegiatan sekolah dan juga penyesuaian waktu pertemuan/rapat antara sekolah dengan pengurus komite sekolah.

Hubungan yang baik juga terjalin antara komite dengan pihak di SMA N 1 Yogyakarta. Cara sekolah menjalin koordinasi dengan pihak komite dalam membahas program sekolah adalah dengan rapat kerja yang diselenggarakan secara rutin setiap satu triwulan atau minimal setiap satu semester. Untuk menilai pelaksanaan kerja komite sekolah di SMA N 1 Yogyakarta monitoring program kerja dilakukan setiap satu triwulan atau minimal satu semester, dan kegiatan monitoring selama ini berjalan cukup efektif dilaksanakan untuk perbaikan program kerja sekolah.

Secara umum bentuk dukungan komite sekolah terhadap program kerja sekolah di SMA N 1 Yogyakarta adalah berupa sumbangan pemikiran untuk pengelolaan sekolah, misalnya menjadi konsultan dalam penyelenggaraan rintisan

SMA Bertaraf Internasional. Ada juga beberapa pengurus sekolah yang memberikan sumbangan dana (bersifat tidak tetap) untuk pelaksanaan program kerja sekolah.

b. Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah di SMA 3

Yogyakarta

Pemahaman beberapa anggota mengenai tugas dan peran komite sekolah di SMA 3 Yogyakarta sudah sesuai dengan SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah di SMA N 3 Yogyakarta berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung. Dalam dimensi operasional, komite sekolah di SMA N 3 Yogyakarta berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, serta berperan sebagai pendukung sekolah, baik yang berwujud dukungan finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, komite sekolah di SMA N 3 Yogyakarta berperan sebagai pengontrol dan mediator antara pemerintah dan masyarakat. Hal inilah peran dan tugas komite sekolah yang dipandang masih belum maksimal dilaksanakan di SMA N 3 Yogyakarta.

Sosialisasi yang dilakukan mengenai tugas dan peran komite sekolah di SMA N 3 Yogyakarta dilakukan secara tertulis dan lisan. Sosialisasi secara tertulis dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui surat, website, dan pengumuman sekolah, sedangkan sosialisasi secara lisan dilakukan melalui forum rapat sekolah.

Pengurus komite sekolah SMA N 3 Yogyakarta terdiri dari 11 orang dengan jangka waktu kepengurusan selama tiga tahun. Adapun susunan pengurus untuk periode tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut.

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris I
4. Sekretaris II
5. Bendahara I
6. Bendahara II
7. Anggota
 - a. Bidang Penggalian Dana dan Usaha
 - b. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan
 - c. Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah
 - d. Bidang Jaringan Kerjasama/Hubungan Masyarakat
 - e. Bidang Sarana Prasarana

Program komite sekolah yang selama ini berjalan di SMA N 3 Yogyakarta mampu mendukung program kerja sekolah baik akademik maupun non-akademik sebagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Komite sekolah di SMA N 3 Yogyakarta melakukan pertemuan rutin tahunan setiap awal tahun pelajaran baru untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan membuat program kerja tahun berikutnya, serta setiap pergantian semester untuk monitoring dan evaluasi program kerja yang sedang berjalan.

Selain daripada itu, pertemuan juga dilakukan jika ada berbagai permasalahan yang perlu segera diselesaikan (pertemuan insidental).

Komunikasi yang efektif antara sekolah dengan komite sekolah menjadi hal yang penting di SMA N 3 Yogyakarta. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan dan komitmen antara kepala sekolah dan pengurus komite sekolah. Cara sekolah menciptakan komunikasi yang efektif dengan komite selama ini dilakukan antara lain dengan upaya untuk terus menerus melibatkan komite sekolah dalam berbagai kegiatan sekolah dan juga penyesuaian waktu pertemuan/rapat antara sekolah dengan pengurus komite sekolah.

Hubungan yang baik juga terjalin antara komite dengan pihak di SMA N 3 Yogyakarta. Cara sekolah menjalin koordinasi dengan pihak komite untuk membahas program sekolah adalah dengan rapat kerja yang diselenggarakan secara rutin setiap satu triwulan atau minimal setiap satu semester. Untuk menilai pelaksanaan kerja komite sekolah di SMA N 3 Yogyakarta monitoring program kerja dilakukan setiap satu triwulan atau minimal satu semester, dan kegiatan monitoring selama ini berjalan cukup efektif dilaksanakan untuk perbaikan program kerja sekolah.

Secara umum bentuk dukungan komite sekolah terhadap program kerja sekolah di SMA N 3 Yogyakarta adalah berupa sumbangan pemikiran untuk pengelolaan sekolah, misalnya menjadi konsultan dalam penyelenggaraan rintisan SMA Bertaraf Internasional. Ada juga beberapa pengurus sekolah yang memberikan sumbangan dana (bersifat tidak tetap) untuk pelaksanaan program kerja sekolah.

c. Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah di SMA 8

Yogyakarta

Dari hasil wawancara dengan para pengurus komite sekolah, pengurus komite sekolah di SMA N 8 Yogyakarta belum semuanya memahami tugas dan peran komite sekolah di sekolah tersebut walaupun sosialisasi sudah dilakukan. Pengurus komite sekolah di SMA N 8 Yogyakarta terdiri dari 15 orang, namun demikian belum dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Program kerja komite sekolah di SMA N 8 Yogyakarta adalah turut memajukan sekolah dengan terlibat dalam berbagai penyelenggaraan program sekolah. Pertemuan komite sekolah secara rutin dijadwalkan satu bulan sekali, namun dikarenakan berbagai kendala pertemuan yang telah diagendakan tersebut sesuai dengan semestinya. Komunikasi antara sekolah dengan komite sekolah juga belum berjalan secara efektif, hal tersebut ditandai ketika komite sekolah diundang oleh pihak sekolah yang datang hanya sebatas ketua komite sekolahnya saja.

Pengurus komite sekolah SMA N 8 Yogyakarta terdiri dari 20 orang dengan jangka waktu kepengurusan selama tiga tahun. Adapun susunan pengurus untuk periode tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut.

1. Ketua I
2. Ketua II
3. Sekretaris I
4. Sekretaris II
5. Bendahara I
6. Bendahara II

7. Seksi-seksi:
 - a. Usaha Dana
 - b. Pengembangan Pendidikan
 - c. Sarana Prasarana Pendidikan
 - d. Hubungan Masyarakat

2. Upaya Pemberdayaan Komite Sekolah

a. Upaya Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA N 1 Yogyakarta

Upaya sekolah untuk memberdayakan peran komite sekolah di SMA N 1 Yogyakarta dilakukan dengan menciptakan forum dialog/diskusi untuk membahas khusus mengenai program kerja komite sekolah. Forum dialog/diskusi tersebut untuk membahas secara khusus mengenai program kerja komite sekolah. Caranya yaitu dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin maupun insidental yang diselenggarakan atas inisiatif bersama antara pihak sekolah dengan pengurus komite sekolah. Forum dialog/diskusi yang berjalan selama ini cukup efektif dan produktif untuk memberikan berbagai masukan bagi pihak sekolah untuk mengelola program sekolah di SMA N 1 Yogyakarta.

Terjalannya kerjasama antara pihak sekolah dengan komite sekolah tidak lepas dari adanya terciptanya suasana keterbukaan dalam menjalankan peran masing-masing sebagai anggota komite sekolah. Hal tersebut tampak di SMA N 1 YK dalam melibatkan komite sekolah dalam berbagai kegiatan program sekolah. Komite sekolah diundang dalam rapat-rapat sekolah yang bersifat umum dan terbuka, selain itu komite sekolah juga diundang dalam kegiatan-kegiatan lain

misalnya lokakarya semesteran, rapat pembahasan RAPBS, dan rapat pembahasan program kerja tahunan. Upaya lain yang dilakukan dalam menciptakan keterbukaan adalah memberikan berbagai informasi berkaitan dengan kegiatan sekolah baik melalui lisan maupun tertulis pada saat berlangsung forum pertemuan.

Upaya yang dilakukan sekolah untuk memperoleh dukungan dana, tenaga, ide, maupun fasilitas dari komite di SMA N 1 yaitu dengan cara komite sekolah diundang dalam rapat-rapat sekolah yang bersifat umum dan terbuka, selain itu komite sekolah juga diundang dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik terkait penggunaan dana dalam rapat pembahasan RAPBS dan rapat pembahasan program kerja tahunan. Selain itu sekolah juga selalu aktif memberikan berbagai informasi berkaitan dengan kegiatan sekolah baik melalui lisan maupun tertulis pada saat berlangsung forum pertemuan dengan komite sekolah.

Pemberdayaan komite sekolah di SMA N 1 Yogyakarta dilakukan dengan cara konsultasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah dalam implementasi program sekolah, misalnya terjadi pada kegiatan penyusunan KTSP, penyusunan RAPBS, penyelenggaraan program Rintisan SMA Bertaraf Internasional, dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan membicarakan segala masalah, keluhan dan kemajuan yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah. Dengan harapan banyak masukan, ide maupun pendapat terhadap pelaksanaan program sekolah.

Keputusan/kebijakan yang diambil sekolah dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dengan pihak komite sekolah. Keputusan/kebijakan tersebut

adalah yang bersifat umum, strategis, dan keputusan/kebijakan itu memang diatur harus atas persetujuan komite sekolah misalnya penyusunan KTSP, penyusunan RAPBS, penentuan besaran sumbangan dan SPP siswa.

Namun demikian ada beberapa keputusan/kebijakan sekolah yang tidak selalu membutuhkan musyawarah mufakat dengan komite sekolah. Keputusan/kebijakan sekolah yang tidak bersifat diskusi dengan komite sekolah tersebut adalah keputusan/kebijakan yang bersifat harian, operasional, atau juga keputusan/kebijakan yang menyangkut hal-hal yang menjadi otonomi pendidik misalnya penentuan nilai siswa atau kelulusan siswa.

Komite sekolah tidak terlibat dalam pemberian pelayanan di SMA N 1 Yogyakarta, karena komite sekolah lebih banyak berperan sebagai penasehat atau konsultan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Selama ini komite sekolah juga terlibat sebagai pelaksana kegiatan di sekolah seperti pada saat kegiatan-kegiatan program sekolah, dan dalam pelaksanaannya komite sekolah juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program komite sekolah di SMA Unggulan kota Yogyakarta meliputi :

- a. adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu sekolah;
- b. dukungan dana, ide, tenaga dan fasilitas yang memadai;
- c. terjalannya komunikasi yang baik;
- d. koordinasi yang baik;
- e. latar belakang pendidikan anggota komite sekolah; dan
- f. kepala sekolah yang selalu proaktif.

Faktor penghambat pelaksanaan program komite sekolah yaitu faktor kesibukkan pengurus komite sekolah dan jadwal/waktu pertemuan yang terbatas.

b. Upaya Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA N 3 Yogyakarta

Upaya sekolah untuk memberdayakan peran komite sekolah di SMA N 3 Yogyakarta dilakukan dengan menciptakan forum dialog/diskusi untuk membahas khusus mengenai program kerja komite sekolah. Forum dialog/diskusi tersebut untuk membahas secara khusus mengenai program kerja komite sekolah. Caranya yaitu dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin maupun insidental yang diselenggarakan atas inisiatif bersama antara pihak sekolah dengan pengurus komite sekolah. Forum dialog/diskusi yang berjalan selama ini cukup efektif dan produktif untuk memberikan berbagai masukan bagi pihak sekolah untuk mengelola program sekolah di SMA N 3 Yogyakarta.

Terjalannya kerjasama antara pihak sekolah dengan komite sekolah tidak lepas dari adanya terciptanya suasana keterbukaan dalam menjalankan peran masing-masing sebagai anggota komite sekolah. Hal tersebut tampak di SMA N 3 YK dalam melibatkan komite sekolah dalam berbagai kegiatan program sekolah. Komite sekolah diundang dalam rapat-rapat sekolah yang bersifat umum dan terbuka, selain itu komite sekolah juga diundang dalam kegiatan-kegiatan lain misalnya lokakarya semesteran, rapat pembahasan RAPBS, dan rapat pembahasan program kerja tahunan. Upaya lain yang dilakukan dalam menciptakan keterbukaan adalah memberikan berbagai informasi berkaitan dengan kegiatan sekolah baik melalui lisan maupun tertulis pada saat berlangsung forum pertemuan.

Upaya yang dilakukan sekolah untuk memperoleh dukungan dana, tenaga, ide, maupun fasilitas dari komite di SMA N 3 yaitu dengan cara komite sekolah diundang dalam rapat-rapat sekolah yang bersifat umum dan terbuka, selain itu komite sekolah juga diundang dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik terkait penggunaan dana dalam rapat pembahasan RAPBS dan rapat pembahasan program kerja tahunan. Selain itu sekolah juga selalu aktif memberikan berbagai informasi berkaitan dengan kegiatan sekolah baik melalui lisan maupun tertulis pada saat berlangsung forum pertemuan dengan komite sekolah.

Pemberdayaan komite sekolah di SMA N 3 Yogyakarta dilakukan dengan cara konsultasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah dalam implementasi program sekolah, misalnya terjadi pada kegiatan penyusunan KTSP, penyusunan RAPBS, penyelenggaraan program Rintisan SMA Bertaraf Internasional, dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan membicarakan segala masalah, keluhan dan kemajuan yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah. Dengan harapan banyak masukan, ide maupun pendapat terhadap pelaksanaan program sekolah.

Keputusan/kebijakan yang diambil sekolah dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dengan pihak komite sekolah. Keputusan/kebijakan tersebut adalah yang bersifat umum, strategis, dan keputusan/kebijakan itu memang diatur harus atas persetujuan komite sekolah misalnya penyusunan KTSP, penyusunan RAPBS, penentuan besaran sumbangan dan SPP siswa.

Namun demikian ada beberapa keputusan/kebijakan sekolah yang tidak selalu membutuhkan musyawarah mufakat dengan komite sekolah.

Keputusan/kebijakan sekolah yang tidak bersifat diskusif dengan komite sekolah tersebut adalah keputusan/kebijakan yang bersifat harian, operasional, atau juga keputusan/kebijakan yang menyangkut hal-hal yang menjadi otonomi pendidik misalnya penentuan nilai siswa atau kelulusan siswa.

Komite sekolah tidak terlibat dalam pemberian pelayanan di SMA N 1 Yogyakarta, karena komite sekolah lebih banyak berperan sebagai penasihat atau konsultan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Selama ini komite sekolah juga terlibat sebagai pelaksana kegiatan di sekolah seperti pada saat kegiatan-kegiatan program sekolah, dan dalam pelaksanaannya komite sekolah juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

c. Upaya Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA N 8 Yogyakarta

Pihak sekolah telah menjalin koordinasi dengan komite sekolah untuk membahas program sekolah dengan adanya rapat koordinasi setiap satu bulan sekali. Selama ini, kegiatan monitoring belum dilakukan dikarenakan pada saat ini komite sekolah masih vakum/tidak ada kegiatan. Bentuk dukungan komite sekolah terhadap program sekolah selama ini adalah berupa dukungan keuangan (SPP) dan dukungan materiil (seragam), maupun dukungan pemikiran untuk kemajuan sekolah. Selama ini, antara sekolah dengan komite sekolah juga tidak ada forum komunikasi yang secara khusus membahas program kerja komite sekolah. Namun demikian, suasana keterbukaan telah ada diantara sekolah dengan komite sekolah dalam menjalin kerjasama dan terlibat dalam berbagai penyelenggaraan program sekolah, dari tahap perencanaan (penyusunan RAPBS, kalender pendidikan, program tahunan sekolah), tahap pelaksanaan (sebagai

panitia lustrum dan HUT sekolah), maupun pada tahap pengambilan keputusan (penentuan besaran SPP dan uang sumbangan akademik).

Dampak kinerja komite sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah adalah komite sekolah di SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 Yogyakarta memberikan sumbangan pemikiran, dana, maupun legitimasi terhadap pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan strategis sekolah, dan pengelolaan program kerja sekolah yang berujung pada peningkatan mutu sekolah secara berkesinambungan. Dampak kinerja komite sekolah yang signifikan dirasakan di SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 Yogyakarta adalah peningkatan partisipasi *stakeholders*, dukungan pemikiran/ide dalam pengelolaan (perencanaan, monitoring, dan evaluasi) program kerja sekolah. Terlebih pada saat ini, SMA N 1, SMA N 3, dan SMA N 8 Yogyakarta ditunjuk oleh Depdikas untuk menyelenggarakan program Rintisan SMA Bertaraf Internasional, komite sekolah duduk dalam jajaran konsultan penyelenggaraan yang berperan cukup signifikan bagi keberhasilan penyelenggaraan program tersebut.

B. Pembahasan

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan tuntutan yang lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Tuntutan tersebut tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah. Butir-butir ketentuan yang penting di dalam Kepmendiknas tersebut akhirnya juga diakomodasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan daerah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, telah meluncurkan beberapa program dan kegiatan dengan tujuan agar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Renstra Depdiknas 2004-2009, khususnya dalam pilar peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, disebutkan tentang tonggak kunci keberhasilan (*key development milestone*) pembangunan pendidikan dasar dan menengah adalah: (1) 50% Dewan Pendidikan telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, (2) 50% Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, dan (3) Dewan Pendidikan Nasional terbentuk pada tahun 2009.

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56, tercantum bahwa komite sekolah dan madrasah diberikan peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui: (1) nasihat; (2) pengarahan; (3) bantuan personalia, material,

dan fasilitas; maupun (4) pengawasan pendidikan.

Dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan pada bab di atas, kepengurusan komite sekolah telah mengikuti aturan dengan jumlah anggota minimum 11 orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang, dan untuk struktur organisasi seperti disarankan. Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite sekolah. Paling banyak ada tiga orang wanita terwakili dalam komite sekolah, meskipun demikian bendaharawan adalah wanita.

Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki. Sebagian besar anggota komite sekolah mempunyai minat menjadi anggota komite sekolah. Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah dan tidak melalui pemilihan. Beberapa orang yang dulunya adalah anggota BP3 diangkat kembali menjadi anggota komite sekolah dan tugasnya diperluas. Kepengurusan komite sekolah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan dari kepala sekolah.

Pertemuan-pertemuan formal dilakukan secara regular misalnya setiap satu bulan, satu semester, dan satu tahun. Komite sekolah sering mereka diundang oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RAPBS), tetapi mereka dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal-hal yang

berkaitan dengan kalender sekolah. Program-program yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah.

Komite sekolah dengan semangat tinggi merinci perubahan-perubahan di sekolah di dalam empat bidang peningkatan pembelajaran, kesejahteraan guru, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan program kerjanya komite sekolah mengalami berbagai kendala. Kendala yang paling menonjol adalah usaha sekolah untuk mendanai program secara mandiri, terutama karena perencanaan dilakukan lebih dulu, dan kemudian dicarikan pendanaannya. Komite dan sekolah melaksanakan wiraswasta dalam hal ini dengan menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan dana.

Dari keempat peran komite sekolah, peran yang dominan sering dianggap sebagai kriteria keefektifan komite sekolah yaitu dalam hal pengumpulan dana. Kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite oleh sebagian besar dari responden. Sebagian besar responden mengharapkan komite sekolah yang ideal di masa depan mempunyai peran yang lebih besar daripada perannya sekarang. Banyak yang menganggap bahwa lingkungan kerja yang bagus dan anggota yang berkualitas sangat penting, sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama

dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar.

Kebijakan optimalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah merupakan langkah kebijakan yang memiliki peranan dan implikasi penting dalam memenuhi kebutuhan terwujudnya program pendidikan di sekolah yang sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dihasilkan alternatif-alternatif strategi beserta aktivitas pendekatannya, sehingga peran komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta semakin maksimal yang meliputi:

1. Penyusunan regulasi tentang Komite Sekolah yang mengakomodir :
 - a. Kebutuhan akan adanya jaminan dan perlindungan hak dan kewajiban Komite sekolah;
 - b. Sekolah dalam melaksanakan TUPOKSI-nya sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan;
 - c. Kewenangan dan urusan dalam penanganan dan pengelolaan keuangan;
 - d. Kewenangan dalam peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Sekolah; dan
 - e. Formulasi standar AD/ART Komite sekolah.

2. Redefinisi Kemitraan antara Komite Sekolah dan Sekolah

Perumusan bentuk kemitraan Komite Sekolah dengan Sekolah yang diusulkan adalah berbentuk kerjasama Komite Sekolah dan Sekolah dengan kesetaraan hanya pada sisi tugas dan fungsinya sesuai yang disepakati dalam regulasi/peraturan yang mengikat, sedangkan dari sisi kedudukan kerjasama tetap pihak Sekolah (Kepala Sekolah) berada pada posisi pemimpin.

3. Penataan Kelembagaan Komite Sekolah

Model kelembagaan Komite Sekolah yang diusulkan adalah suatu bentuk kelembagaan fungsional yang lebih menitik beratkan pada pelayanan fungsi administrasi dan keuangan, mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sesuai dengan program Sekolah yang telah disusun dan ditetapkan.

4. Kebijakan Rekrutmen Anggota Komite Sekolah

Penetapan kriteria calon anggota Komite Sekolah, antara lain :

- a. Memiliki kepeduliandan dedikasi yang tinggi akan keberlangsungan program dan kemajuan sekolah;
- b. Alumni atau orang tua murid yang memiliki ikatan premodial terhadap sekolah, memiliki track record yang baik dan aktif serta sense belonging yang tinggi;
- c. Memiliki waktu yang cukup;
- d. Memiliki kapabilitas/kemampuan yang memadai; dan
- e. Mampu bekerja sama dan mengerti akan *Tim Building*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan:

1. Pelaksanaan program kerja komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta telah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran komite sekolah dan peran serta aktif komite sekolah dalam penyelenggaraan program kerja sekolah.
2. Pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta dilakukan dengan berbagai upaya komunikasi intensif dan terbuka antara pihak sekolah dengan komite sekolah, dan pelibatan komite sekolah dalam penyelenggaraan program kerja sekolah yang bersifat strategis.
3. Faktor pendukung pelaksanaan program komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta meliputi: (a) adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu sekolah; (b) dukungan dana, ide, tenaga dan fasilitas yang memadai; (c) terjalinnya komunikasi yang baik; (d) koordinasi yang baik; (e) latar belakang pendidikan anggota komite sekolah; dan (f) kepala sekolah yang selalu proaktif. Faktor penghambat pelaksanaan program komite sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta adalah: (a) faktor kesibukkan pengurus komite sekolah, dan (b) jadwal/waktu pertemuan yang terbatas.
4. Secara umum kinerja komite sekolah berdampak positif terhadap terhadap mutu pendidikan di SMA Unggulan Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan

adanya dukungan materiil maupun nonmateriil dalam berbagai program peningkatan mutu sekolah.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran:

1. Pihak sekolah hendaknya lebih proaktif melibatkan komite sekolah dalam berbagai pengambilan kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas sekolah.
2. Pihak sekolah hendaknya memiliki dan melaksanakan mekanisme kontrol kinerja komite sekolah secara berkesinambungan, sehingga bila terjadi hal-hal yang kurang efektif pada proses kerja komite sekolah dalam segera diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Depdiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Boston: Sage Publications.
- Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta; Depdiknas.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai tugas dan peran komite sekolah di sekolah ini? Menurut Bapak/Ibu apakah tugas dan peran tersebut sudah berjalan dengan semestinya?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan mengenai tugas dan peran komite sekolah di sekolah ini?
3. Terdiri dari siapa saja SDM atau pengurus komite sekolah di sekolah ini? Apakah semua berjalan sesuai tugasnya?
4. Program-program komite sekolah apa saja yang sudah terlaksana di sekolah ini? Apakah program-program tersebut dirancang setiap tahunnya?
5. Berapa kali pertemuan rutin yang dilakukan untuk pelaksanaan program kerja komite sekolah?
6. Bagaimana cara sekolah menciptakan komunikasi yang efektif dengan komite sekolah?
7. Bagaimana sekolah menjalin koordinasi dengan pihak komite sekolah untuk membahas program sekolah?
8. Kapan monitoring dilakukan? Apakah efektif monitoring tersebut?
9. Apa saja bentuk dukungan komite terhadap program sekolah selama ini?

B. Upaya Pemberdayaan Komite Sekolah

1. Apakah sudah tercipta forum dialog/diskusi untuk membahas program kerja komite sekolah? Apakah efektif forum tersebut?
2. Bagaimana sekolah dan komite menjalin suasana keterbukaan dalam menjalin kerja sama?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperoleh dukungan dana, tenaga, ide, maupun fasilitas dari komite sekolah?
4. Apakah selama ini terjalin konsultasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah dalam implementasi program sekolah?
5. Apakah setiap keputusan/kebijakan yang diambil sekolah atas dasar musyawarah mufakat dengan pihak komite sekolah? Contohnya apa?
6. Apakah selama ini komite sekolah terlibat dalam pemberian pelayanan di sekolah? Contohnya apa?
7. Apakah selama ini komite sekolah terlibat sebagai pelaksana kegiatan di sekolah? Contohnya apa?
8. Apakah selama ini komite sekolah juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan?

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Komite Sekolah

1. Apa yang menjadi faktor pendukung terhadap pelaksanaan program komite sekolah di sekolah ini?
 - a. Adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu sekolah

- b. Dukungan dana, ide, tenaga dan fasilitas yang memadai
 - c. Terjalannya komunikasi yang baik
 - d. Koordinasi yang baik
 - e. Latar belakang pendidikan anggota komite
 - f. Lainnya:.....
2. Apa yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan program komite sekolah di sekolah ini?
- a. Kesibukkan komite
 - b. Sosialisasi komite
 - c. Jadwal/waktu pertemuan yang terbatas
 - d. Ketidaksepeahaman tujuan
 - e. SDM yang tidak berkualitas
 - f. Lainnya:

D. Dampak Kinerja Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu

1. Adakah dampak kinerja komite sekolah terhadap layanan bagi siswa di sekolah ini?
2. Adakah dampak kinerja komite terhadap terjalinnya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan komite sekolah di sekolah ini?
3. Adakah dampak kinerja komite sekolah terhadap semakin luasnya hubungan/kemitraaan di luar sekolah?
4. Adakah dampak kinerja komite sekolah terhadap keterlibatan menyeluruh partisipan dalam pengambilan keputusan program-program sekolah di sekolah ini?
5. Adakah dampak kinerja komite sekolah terhadap dukungan input (dana dan fasilitas) di sekolah ini?
6. Adakah dampak kinerja komite sekolah terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah?
7. Adakah dampak kinerja komite sekolah terhadap evaluasi dan akuntabilitas program di sekolah ini?

—∞—

PEDOMAN OBSERVASI

- A. Rapat Komite Sekolah**
- B. Interaksi antar Pengurus Komite Sekolah**
- C. Interaksi Pengurus Komite Sekolah dengan Warga Sekolah**
- D. Ruang Kerja Komite Sekolah**

—o—

PEDOMAN DOKUMENTASI

- A. Surat Keputusan Komite Sekolah**
- B. AD/ART Komite Sekolah**
- C. Program Kerja Komite Sekolah**
- D. Notulen Rapat Komite Sekolah**
- E. Laporan Kegiatan Komite Sekolah**

—o—

PERSONALIA TENAGA PENELITI

1. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap	: Tina Rahmawati, M.Pd
b. Jenis Kelamin	: Perempuan
c. NIP	: 132304797
d. Disiplin Ilmu	: Manajemen Pendidikan
e. Pangkat/Golongan	: Penata Muda/ III/a
f. Jabatan fungsional/Struktural	: Tenaga Pengajar
g. Fakultas/Jurusan	: FIP/ Administrasi Pendidikan
h. Waktu Penelitian	: 6 jam/minggu

2. Anggota Penelitian

a. Nama Lengkap	: Slamet Lestari, S.Pd
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
c. NIP	: 132299485
d. Disiplin Ilmu	: Manajemen Pendidikan
e. Pangkat/Golongan	: Penata Muda/ III/a
f. Jabatan fungsional/Struktural	: Tenaga Pengajar
g. Fakultas Jurusan	: FIP/ Administrasi Pendidikan
h. Waktu Penelitian	: 4 jam/minggu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Tina Rahmawati, M.Pd.
2. N I P : 132304797
3. Satminkal : FIP Universitas Negeri Yogyakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kutoarjo, 20 Juli 1980
5. Agama/Jenis kelamin : Islam/Wanita
6. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/ III/
7. Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar
8. Alamat Kantor : Karangmalang, Yogyakarta. 55281
9. Alamat Rumah : Gowongan JT III/321 RT 26 RW 06 YK
55232

B. Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Tahun Ijasah	Jurusan/Prodi
1.	Universitas Negeri Yogyakarta	2003	Administrasi Pendidikan

C. Pendidikan Tambahan

No.	Pendidikan Tambahan	Tahun
1.	<i>Training of Trainers untuk Communicative Academic English, P3B UNY</i>	2004
2.	Pengembangan Kepribadian Melalui ESSI Training, UNY	2005
3.	Pelatihan Motivasi Berprestasi (AMT) dan Outbound, UNY	2005
4.	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dosen Jurusan AP FIP UNY dalam Penggunaan Multimedia untuk Pembelajaran, UNY	2005
5.	Pelatihan Perancangan Program Perkuliahan, FIP UNY	2005

D. Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Tahun
1.	Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY	2003

E. Pengalaman Mengajar

1. Manajemen Pendidikan
2. Manajemen Peserta Didik
3. Manajemen Kantor Lembaga Pendidikan
4. Manajemen Fasilitas Pendidikan
5. Manajemen Mutu Terpadu

F. Penelitian

No.	Penelitian	Tahun
1.	Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah Di SD Inti se-Kecamatan Godean	2003
2.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di LPMP YK	2005

G. Pengabdian pada Masyarakat

No.	Pengabdian pada Masyarakat	Tahun
1.	Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah ; Klasifikasi dan Katalogisasi Bahan Pustaka Dinas P & K Kabupaten Kulon Progo.	2005
2.	Manajemen dalam Pengembangan Karir di Lingkungan Kerja. Yogyakarta.	2006

H. Simposium/Seminar/Lokakarya/Sarasehan

No.	Simposium/Seminar/Lokakarya/Sarasehan	Tahun
1.	Seminar Nasional Rekonstruksi dan Revitalisasi Ilmu Pendidikan dalam Pembaharuan Pendidikan Nasional	2004
2.	Seminar Nasional “Penjernihan Peran Pendidikan Nasional dalam <i>Nation and Character Builing</i> ”. UNY.	2005
3.	Seminar Nasional “Refleksi danm Reorientasi Pendidikan Nilai di Indonesia”. UNY.	2005
4.	Seminar Nasional PPs Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Budaya.	2005
5.	Seminar Nasional Refleksi dan Reorientasi Pendidikan Nilai di Indonesia.	2006

Yogyakarta, 18 Desember 2008
Penyusun,

Tina Rahmawati, M.Pd.
NIP 132304797

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Slamet Lestari, S.Pd
2. N I P : 132299485
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 27 Juni 1977
4. Agama/Jenis Kelamin : Islam/ Laki-laki
5. Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III/a
6. Jabatan Akademik : Asisten Ahli
7. Jrs./Fak./Univ. : Adminitrasi Pendidikan FIP UNY
8. Alamat Kantor : Karangmalang, Yogyakarta. 55281
9. Alamat Rumah : Karanglo, Sidomoyo, Godean, Sleman.

B. Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Tahun Ijasah	Jurusan/Prodi
1.	Uiversitas Negeri Yogyakarta	2003	Administrasi Pendidikan

C. Pendidikan Tambahan

No.	Pendidikan Tambahan	Tahun
1.	Pelatihan Manajemen Praktikum/Magang Mahasiswa Program S1 Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI. Peserta.	2003
2.	<i>English Course for Junior Lecturers of UNY.</i> Yogyakarta. Peserta.	2003

D. Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Tahun
1.	Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY	2002

E. Pengalaman Mengajar

1. Aplikasi Komputer MP
2. Manajemen Kurikulum
3. Manajemen Pendidikan
4. Manajemen Dikdasmen
5. Analisis Data MP
6. Sistem Informasi Manajemen

F. Penelitian

No.	Penelitian	Tahun
1.	Pembinaan Kecakapan Sosial (<i>Research Grant</i>) di SD Kabupaten Sleman.	2003

G. Pengabdian pada Masyarakat

No.	Pengabdian pada Masyarakat	Tahun
1.	Instruktur Pelatihan Komputer “ <i>Microsoft Word dan Microsoft Excel</i> ” di Kantor Cabang P dan K Kecamatan Kasihan	2003

No.	Pengabdian pada Masyarakat	Tahun
	Kabupaten Bantul	

H. Simposium/Seminar/Lokakarya/Sarasehan

No.	Simposium/Seminar/Lokakarya/Sarasehan	Tahun
1.	Seminar Nasional “Otonomi dan Privatisasi Pendidikan” (Perspektif Politik dan Ekonomi Pendidikan). Dies Natalies ke-48 FIP UNY. Peserta.	2003

Yogyakarta, 18 Desember 2008
Penyusun,

Slamet Lestari, S.Pd.
NIP 132299485